



**Investasi Menuju
Indonesia Emas,
Bupati Ardiansyah
Prioritaskan Kualitas SDM
dalam RKPD Kutim 2027**

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlakul Kamilah Kunci Keberhasilan
Membangun Laju Adhigati Kabupaten

Selengkapnya
Kutaitimurkab.go.id

Edisi April 2026
Minggu Pertama

[kominfo.kutim](#)

    **kominfo.kutim**

Edisi April 2026
Minggu Pertama



DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK

Susun RKPD 2027, Dinkes Kutim Libatkan RSUD dan Puskesmas se-Kecamatan

Sangatta - 01 April 2026

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim melaksanakan Forum Perangkat Daerah (Forum SKPD) yang membahas usulan program dan kegiatan di bidang kesehatan yang menjadi bagian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 2027. Kegiatan ini melibatkan berbagai Perangkat Daerah (PD), perwakilan RSUD, serta puskesmas dari seluruh kecamatan guna menyatukan langkah dan arah pembangunan kesehatan.

Forum SKPD yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kutim pada Rabu (01/04/2026) tersebut membahas sejumlah isu strategis, di antaranya sinkronisasi program kesehatan daerah dengan kebijakan pusat dan provinsi, pemetaan permasalahan kesehatan beserta solusi strategis, penyusunan rencana berbasis data, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penentuan alokasi anggaran yang efektif dan efisien.

Selain itu, forum ini juga membahas 50 program prioritas Bupati Ardiansyah Sulaiman, khususnya di bidang kesehatan. Program tersebut mencakup bantuan tenaga kesehatan dan pendidikan, peningkatan insentif guru swasta dan penyuluh pertanian, pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan serta kesehatan, program gratis minum susu dan makan buah untuk menekan angka stunting, jaminan BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, layanan dokter keliling untuk wilayah desa dan terpencil, serta pemberian insentif bagi kader posyandu sebesar Rp500 ribu per bulan.

Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menyusun rencana kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang dirancang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan didukung oleh data yang akurat.

"Fokus kami adalah memperkuat kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan, memperluas akses layanan dengan penguatan puskesmas serta fasilitas rujukan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP)," ujarnya.

Forum yang bertujuan menyelaraskan kebijakan dan program kesehatan daerah dengan arah pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran ini, menjadi bagian untuk mendorong penguatan peran serta masyarakat dalam upaya promotif dan preventif, termasuk dalam intervensi gizi untuk percepatan penurunan stunting.

"Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kami optimistis target pembangunan kesehatan Kutai Timur dapat tercapai secara maksimal," tambahnya.

RSUD SANGATTA

f @ kominfo.kutim



DISKOMINFO
STAPEN KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

RSUD Muara Bengal Resmi Operasikan Ruang Bedah, Tujuh Dokter Spesialis Siap Layani Masyarakat

Sangatta - 01 April 2026

RSUD Muara Bengal terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan sejak mulai beroperasi pada 2024. Kehadiran rumah sakit ini menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat Muara Bengal dan wilayah sekitarnya.

Memasuki tahap pengembangan layanan, pada Rabu (01/04/2026), RSUD Muara Bengal secara resmi mulai mengoperasikan ruang bedah. Momentum ini ditandai dengan keberhasilan pelaksanaan operasi perdana yang dilakukan oleh tim kamar operasi (OK), dipimpin oleh dr. James Setiady dan dr. Fendy Frans Elya Cohen Manalu, bersama tim medis yang terdiri dari Umam, Rudini, Tomi, Arif, dan Ishak.

Adapun tindakan medis yang dilakukan meliputi kasus obstetri dan ginekologi berupa tindakan curretage terhadap abortus inkomplit, serta pada kasus bedah umum berupa fraktur digiti III manus sinistra dan cedera remuk (crush injury) pada tangan.

Direktur RSUD Muara Bengal, dr. Andriansyah, menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan rumah sakit. Dengan beroperasinya ruang bedah, masyarakat kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan tindakan operasi.

"Ini menjadi langkah besar bagi kami dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan berdampak langsung terhadap keselamatan serta kesembuhan pasien," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung pengembangan layanan di RSUD Muara Bengal, di antaranya Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Muslimin serta Kepala Dinas Kesehatan Kutim, dr. Yuwana Sri Kurniawati atas bimbingan, dukungan, dan fasilitasi yang diberikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, menyampaikan bahwa RSUD Muara Bengal saat ini telah didukung oleh tujuh dokter spesialis, yaitu spesialis penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, radiologi, serta patologi klinik.

"Empat layanan dasar dan tiga layanan penunjang ini telah tersedia melalui sistem penugasan khusus," jelasnya saat dihubungi awak media.

Lebih Lanjut, dr. Yuwana menjelaskan, adanya layanan dokter spesialis di RSUD Muara Bengal ini merupakan wujud nyata program prioritas bupati yaitu mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat terpencil.

Ia menambahkan, pembiayaan insentif tenaga medis dilakukan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

"Pembiayaan dilakukan dengan sistem sharing cost antara provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, pelayanan dapat terus berjalan optimal," lanjutnya.





DPPKB Kutim Matangkan Rencana Kerja 2027, Fokus Sinkronisasi Program dan Penguatan SDM

Sangatta - 2 April 2026

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat Forum Perangkat Daerah pada Kamis (2/4/2026) di ruang rapat besar kantor setempat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mematangkan rencana kerja tahun 2027 yang selaras dengan visi besar menuju Kutai Timur Sejahtera.

Mewakili Kepala Dinas, Sekretaris DPPKB Jumran membuka forum dengan menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terhubung, dan terintegrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

“Musyawarah perangkat daerah ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai wadah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program, dan kegiatan, termasuk lokasi serta kelompok sasaran yang akan dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah tahun 2027,” ujar Jumran di hadapan peserta.

Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan DPPKB selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutim 2027, yakni “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera.”

Jumran juga mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Beberapa poin utama yang ditekankan antara lain mempertajam indikator dan target kinerja agar lebih terukur, menyelaraskan program antar-perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih, serta menyesuaikan perencanaan dengan pagu indikatif secara realistis dan akuntabel.

“Kami juga memohon dukungan seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama menindaklanjuti usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan serta pokok-pokok pikiran DPRD, sehingga perencanaan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Forum yang berlangsung interaktif ini dihadiri oleh perwakilan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, termasuk para penyuluh KB.

Turut hadir para kepala bidang di lingkungan DPPKB, yakni Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Ani Saida, Kabid Keluarga Berencana Mustika, Kabid Pengendalian Penduduk Tristiningsih, serta Kabid Penyuluhan dan Pergerakan Yunita Ronting, bersama pejabat fungsional lainnya.



**DISKOMINFO
STAPER KUTIM**

Kutai Timur Dalam Sepekan

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

Bangun Ekosistem Informasi Berkualitas, Diskominfo Kutim Rangkul Insan Pers

Sanggatta - 2 April 2026

Silaturahmi menjadi bagian dari tradisi baik yang masih dipertahankan oleh masyarakat Indonesia untuk untuk mempererat tali persaudaraan, menjaga keharmonisan sosial, serta menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai antar sesama.

Tradisi ini tidak hanya dilakukan pada momen tertentu seperti hari raya, tetapi juga menjadi kebiasaan yang terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nilai kebersamaan dan gotong royong yang telah mengakar kuat dalam budaya bangsa.

Tradisi tersebut tidak hanya berlaku bagi sesama warga namun juga lazim dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali pemerintah. Bertempat di ruang rapat Diskominfo Staper Kutim. Puluhan jurnalis dari berbagai media baik cetak maupun elektronik menghadiri undangan Dinas yang beralamat di jalan Prof Dr Sudiatmo Kawasan Pemerintah Bukit Pelangi Sanggatta tersebut. Kamis (02/04/2026)

Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, menegaskan bahwa pertemuan dengan insan pers tersebut tidak hanya sekadar ajang pertemuan, tetapi juga wadah untuk berdiskusi, menyampaikan kritik, serta memberikan saran demi perbaikan bersama.

"Ke depan, kita akan lebih sering berkumpul untuk mengevaluasi dan memperkuat kolaborasi bersama antara pemerintah dan insan pers minimal sebulan sekali atau 3 bulan sekali," ujar Ronny.

Ronny juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong seluruh insan pers di Kutai Timur agar terus berkembang dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ia turut mengajak organisasi pers seperti PWI, PWRI, JMSI, AMSI, dan SMSI untuk berperan aktif dalam menjembatani berbagai peristiwa yang menjadi bagian penting dari sebuah proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyajian dalam sebuah pemberitaan, yang tidak hanya memberikan sebuah peristiwa. Namun lebih dari itu, jurnalis juga berkewajiban untuk menyajikan informasi yang substantif

"Kita harus saling terbuka, transparan, dan saling mengingatkan demi kebaikan bersama," imbuhnya.

Selain itu, Ronny berharap kedepan pemberitaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga aktif mengangkat isu-isu di tingkat kecamatan dan desa, termasuk keluhan masyarakat agar bisa terekspos dengan baik.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan, Aji Nazarudin, menekankan pentingnya penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan media harus terus dijaga agar tetap selaras dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

"Dengan begitu, informasi yang diterima publik juga akan memberikan dampak positif dan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat," pungkasnya.

Dirinya juga berharap terjalin hubungan yang semakin erat antara Diskominfo Staper Kutai Timur dan insan pers, serta tercipta ekosistem informasi yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak Polity, Berakhlak Akhlak, Berakhlak
Berakhlak Loyal, Berakhlak Keadilan



Bupati Ardiansyah Minta Generasi Muda Kutim Melek Digital dan Siap Bersaing di Masa Depan

Sanggatta - 2 April 2026

Suasana khidmat menyelimuti Ruang Akasia, Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Kamis (2/4/2026), saat Civitas SMA Negeri 1 Sangatta Utara menggelar pelepasan peserta didik Angkatan 27 Tahun Ajaran 2025/2026. Kegiatan ini bertambah spesial karena dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman.

Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menekankan pentingnya para generasi penerus ini yang sudah di nyatakan lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia menyampaikan bahwa pemerintah, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Kutim, telah menyediakan berbagai kebijakan yang mendukung untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa.

Secara gamblang ia merinci sejumlah program bantuan pendidikan, di antaranya Beasiswa Grastispol oleh Provinsi termasuk Beasiswa Kutim Tuntas yang sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, terdapat program khusus Beasiswa Kutim Indonesia Emas yang bekerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan sejumlah perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), dengan kuota sekitar 50 siswa setiap tahun.

“Meskipun begitu banyak kebjakan yang kita hadirkan (beasiswa). Namun masih banyak yang belum mengambil kesempatan itu. Saya berharap sekolah, orang tua, dan siswa proaktif mengambil peluang ini demi pendidikan masa depan,” tegasnya.

Dukungan tidak hanya diberikan oleh Pemerintah. Dunia usaha (perusahaan) juga tak mau ketinggalan untuk ikut berkontribusi memberikan program beasiswa bagi para pelajar, seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) serta lembaga non-pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menyediakan kuota beasiswa bagi 70 siswa setiap tahunnya.

Bupati juga mengingatkan para siswa bahwa, saat ini mereka hidup di era digital yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi informasi di berbagai sektor. Ia berharap generasi muda Kutim mampu berkontribusi aktif dalam setiap proses pembangunan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Kepala Sekolah Tatik Widayani menyampaikan bahwa menuntut ilmu di bangku sekolah selama tiga tahun tidak hanya sebatas mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, sekolah menjadi wadah untuk membentuk karakter dan mental siswa.

“Di sekolah inilah kalian belajar tentang persatuan dalam keberagaman, disiplin, serta kolaborasi. Bekal ini akan menjadi fondasi masa depan kalian, Jadilah generasi yang berkontribusi bagi bangsa dan daerah. Di mana pun kalian berada, bawalah nama baik almamater dengan penuh integritas,” pungkasnya.



DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan



bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK

Diskominfo Staper Matangkan Strategi Digital Dalam RKPD 2027

Sanggata - 2 April 2026

Sebagai motor penggerak transformasi digital di Kutai Timur (Kutim), Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kutai Timur (Diskominfo Staper) mengambil langkah penting dalam mematangkan kerangka kerja pembangunan masa depan yang berfokus pada sinkronisasi program strategis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah proaktif ini diambil untuk menjamin bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dirancang tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu ekosistem digital yang terpadu. Hal ini dianggap krusial agar hasil pembangunan nantinya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara tepat sasaran dan transparan.

Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian yang diwakili Sekretaris, Rasyid, menjelaskan bahwa tahapan Rancangan Awal (Ranwal) merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, koordinasi yang intensif di fase ini adalah kunci utama untuk menciptakan efisiensi anggaran, sehingga tidak ada tumpang tindih program antar instansi.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya penyelarasan pendapat agar seluruh OPD memiliki arah yang sama dalam mendukung prioritas pemerintah. Ia menginstruksikan agar setiap instansi mampu membedah program kegiatannya sehingga lebih berorientasi pada hasil bukan sekadar pemenuhan administratif.

"Setiap instansi harus menyusun program kegiatan yang menunjang prioritas pemerintah secara efektif," ujar Rasyid disela kegiatan guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang berlangsung di ruang rapat Diskominfo Kutim, Bukit Pelangi Kawasan Pemerintahan Sanggata, Kamis (02/04/2026)

Lebih lanjut, dirinya menyebut, bahwa dalam dokumen Ranwal 2027, Diskominfo Staper telah menetapkan arah kebijakan yang lebih spesifik. Fokus utama terbagi ke dalam tiga pilar besar yang akan menjadi fondasi transformasi digital di Kabupaten Kutai Timur. Di antaranya, Penguatan Infrastruktur mengenai jangkauan jaringan teknologi informasi hingga ke pelosok Kutai Timur.

Selain itu, Integrasi Aplikasi yang berperan untuk optimalisasi layanan publik berbasis digital dan penyebarluasan informasi yang lebih transparan. Sementara itu, Satu Data Indonesia guna memperkuat statistik sektoral melalui pengelolaan portal data yang akurat sebagai basis pengambilan kebijakan.

Dihadapan Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Bapedda Kutim, Sugiono serta perwakilan Perangkat Daerah, ia menyebut bahwa melalui sinergi yang dibangun sejak dini, Diskominfo optimis perencanaan yang matang akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dirinya menegaskan komitmennya untuk mengawal proses ini hingga tahap realisasi. Baginya, ia berharap dokumen RKPD 2027 tidak hanya menjadi tumpukan kertas rencana, tetapi menjadi peta jalan yang nyata bagi kemajuan daerah.





DISKOMINFO
STUPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

bangga
malayani
bangsa

BerAKHLAK

Manasik Haji Terintegrasi Kutim Resmi Dimulai, 169 Jamaah Ikuti Pembekalan

Sangatta - 2 April 2026

Pelaksanaan Manasik Haji Terintegrasi tingkat Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun 1447 H/2026 Masehi diikuti sebanyak 169 calon jamaah dan akan berlangsung selama tiga hari dari Sabtu hingga Senin.

Kegiatan yang menjadi bagian dari persiapan menyeluruh sebelum keberangkatan ke Tanah Suci itu dipusatkan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kutai Timur, bukit pelangi sangatta, Sabtu (04/04/2026). Mengusung konsep pelayanan haji yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Melalui manasik ini, nantinya para jamaah tidak hanya dibekali pemahaman tata cara ibadah haji, tetapi juga dipersiapkan secara fisik dan mental agar mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan mandiri.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, berkesempatan membuka kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya kesiapan fisik dan mental bagi para jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di Masjid Agung Al Faruq sebagai sarana latihan ibadah haji.

"Di sana telah tersedia replika Ka'bah dengan ukuran panjang dan tingginya sama, serta lintasan sa'i yang bisa digunakan untuk latihan," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Ardiansyah mengungkapkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan fasilitas pendukung di Masjid Agung tersebut untuk persiapan latihan ibadah haji dan umrah di Kutai Timur.

"InsyaAllah dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pembangunan kawasan Islamic Center di mesjid agung akan selesai, termasuk penyediaan mess atau penginapan bagi jamaah haji dan umrah," tambahnya.

Dirinya juga berpesan agar jamaah untuk langsung menghubungi atau berkomunikasi dengan petugas apabila menghadapi kendala dan kesulitan selama pelaksanaan ibadah haji.

"Kami juga berpesan kepada para petugas agar benar-benar menjaga dan memperhatikan kondisi jamaah," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Timur, Mohlis Hasan, menyampaikan bahwa total jamaah haji asal Kalimantan Timur pada tahun 2026 mencapai 3.166 orang yang dijadwalkan berangkat pada 26 April 2026 melalui Embarkasi Balikpapan.

Mohlis Hasan menekankan pentingnya kesiapan fisik sebagai bagian utama dari keberhasilan ibadah haji. Dirinya juga menganjurkan agar jamaah mulai rutin berolahraga, khususnya berjalan kaki sejauh kurang lebih 7 kilometer setiap hari.

"Hal ini bertujuan untuk melatih ketahanan tubuh saat melaksanakan rangkaian ibadah seperti tawaf dan sa'i," ujarnya.





Optimalisasi Satu Data, Diskominfo Staper Kutim Gelar Bimtek Operator Portal Data Daerah 2026

Sangatta - 2 April 2026

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Portal Satu Data Pemerintah Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Dloung Meeting Room, Hotel Royal Victoria Sangatta, pada Senin (06/04/2026) dan akan berlangsung selama dua hari hingga 7 April 2026.

Bimtek ini diikuti oleh seluruh operator perangkat daerah (PD) dengan mengusung tema "Optimalisasi Portal Satu Data dalam Mendukung Kutai Timur Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing."

Mewakili Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar H. Siburian, dalam sambutannya menegaskan bahwa transformasi digital saat ini membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan data.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan asumsi dalam pengambilan kebijakan, melainkan harus berbasis pada data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Data bukan sekadar angka, melainkan representasi arah kebijakan dan masa depan Kutai Timur. Selama ini tantangan terbesar yang kita hadapi adalah data yang tersebar di berbagai perangkat daerah, perbedaan format, serta belum terintegrasi secara sistematis," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan berbagai kendala, seperti sulitnya akses data, terjadinya perbedaan informasi, hingga keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kebijakan Satu Data Indonesia menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola data yang efektif dan efisien.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberadaan data saja tidak cukup, tetapi kualitas data juga harus menjadi perhatian utama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

"Melalui portal Satu Data Kutai Timur, diharapkan data dapat diakses dengan cepat, mudah, terintegrasi, dan memiliki kualitas yang terjamin. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh birokrasi, tetapi juga langsung oleh masyarakat," jelasnya.

Ia mencontohkan, data yang akurat dan terintegrasi dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran, menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, serta mengidentifikasi potensi ekonomi daerah secara lebih optimal.

Selain itu, transparansi informasi publik juga akan meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah daerah secara terbuka.

Ronny juga mengimbau seluruh perangkat daerah untuk aktif menginput dan mempublikasikan data melalui PPID, sehingga fungsi diseminasi informasi kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Serahkan 259 SK Kenaikan Pangkat, Sekda Rizali Hadi Ingatkan ASN Kutim Jaga Kinerja di Tengah Efisiensi Anggaran

Sangatta - 6 April 2026

Sebanyak 259 Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat. Penyerahan SK tersebut secara simbolis diserahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur Rizali Hadi, di halaman Kantor BKPSDM, Senin (06/04/2026).

Diketahui, Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh negara atas prestasi kerja dan pengabdian ASN yang bersangkutan terhadap negara. Dalam sambutannya, pimpinan menekankan bahwa kenaikan pangkat ini bukan sekadar hak, melainkan amanah yang harus dibarengi dengan peningkatan kinerja dan tanggung jawab.

Dalam arahannya, Ia menekankan, bahwa kenaikan jabatan ini adalah bentuk penghargaan atas loyalitas pegawai. Menurutnya, kenaikan pangkat ini merupakan implementasi dari Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS. Kebijakan ini diharapkan menjadi suntikan motivasi bagi para pegawai untuk terus meningkatkan performa pelayanan publik di tengah dinamika penyesuaian anggaran daerah.

"Kenaikan pangkat ini adalah hak yang patut disyukuri sebagai bukti pengabdian saudara sekalian, meskipun saat ini pemerintah harus melakukan pengelolaan anggaran secara lebih cermat demi menjaga keseimbangan neraca keuangan daerah," tutur Rizali.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyinggung di tengah kebijakan terkait efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis dengan melakukan penyesuaian program yang dilaksanakan. Salah satunya terkait belanja pegawai.

Rizali mengaku, pengambilan keputusan tersebut saat ini, menjadi salah satu pilihan yang paling objektif agar selaras dengan aturan pemerintah pusat. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap kualitas layanan kepada masyarakat.

"Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari upaya mitigasi agar tidak terjadi kendala administratif di masa mendatang, sehingga hak-hak pegawai tetap terlindungi sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

Diketahui, pemberian SK Kenaikan Pangkat ini diberikan kepada para ASN yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Kutim. hadir pada kesempatan itu Kepala BKSDM Kutim Misliansyah, beberapa Kepala PD yang menerima SK serta undangan lainnya.

Sekda Kutim Pastikan TPP ASN Tak Dipotong Selama Kebijakan WFH

Sangatta - 6 April 2026

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Timur Rizali Hadi, memastikan bahwa izin kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan ada pemotongan ketika kebijakan Work For Home (WFH) diberlakukan di lingkup Pemkab Kutim.

"Saat ini masih menunggu Arahan dari Bupati terkait pemberlakuannya di Kutim. Namun jika sudah diterapkan pemantauan terhadap kinerja ASN itu tetap kita kontrol melalui e-Kinerja-nya," ujar Rizali Hadi saat ditemui awak media, Senin (06/04/2026).

Ia menyebut, bahwa esensi dari kebijakan ini hanyalah transfer lokasi kerja untuk mencapai efisiensi, tanpa mengurangi standar tanggung jawab yang ada. Pengawasan ketat tetap dilakukan secara digital oleh atasan langsung di masing-masing instansi.

Mengenai aspek administrasi, Rizali menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan tidak mengalami perubahan. Setiap dokumen atau output kerja para ASN wajib diunggah ke sistem aplikasi untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan (E-Kinerja). Ia juga mengingatkan agar para pegawai tetap menjaga saluran komunikasi tetap terbuka guna mengantisipasi koordinasi yang bersifat mendesak.

"Laporan-laporan itu diberikan pada atasan untuk kemudian dilakukan persetujuan. Komunikasi harus tetap ada, apabila ada hal yang mendesak atau mendesak, kami mohon untuk tidak mematikan telepon," tambahnya.

Mengingat laporan kinerja tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, hak keuangan para ASN akan menginstalnya secara penuh. Namun, pemerintah juga menegaskan tidak ada alokasi anggaran tambahan untuk fasilitas pendukung selama bekerja dari rumah, seperti paket data internet.

"TPP tidak berpengaruh karena tetap ada laporan seperti biasa. Kami memberikan izin berdasarkan laporan tersebut" tegasnya.

"Harapan kita kinerjanya berjalan normal, terutama bagi unit pelayanan umum yang tidak mengenal istilah WFH karena harus melayani masyarakat secara langsung".

Rizali Hadi
Sekretaris Daerah

Terakhir, ia memberikan catatan khusus bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti fasilitas kesehatan. Jabatan administrasi dikelola lokasi, namun petugas teknis di lapangan wajib tetap berada di tempat tugas demi menjamin pelayanan publik tidak lumpuh.

Diketahui, Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian terkait pola kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui skema kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH). Dengan bernomor 800.1.5/3349/SJ, ASN ditetapkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap hari Jumat.





Investasi Menuju Indonesia Emas, Bupati Ardiansyah Prioritaskan Kualitas SDM dalam RKPD Kutim 2027

Sangatta - 7 April 2026

Bupati Ardiansyah Sulaiman menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar forum formalitas, melainkan ruang kolaborasi strategis antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan daerah.

"Musrenbang ini harus menjadi wadah untuk menghasilkan masukan yang positif dan konstruktif demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata," ujarnya saat memberikan arahan dalam Musrenbang Tahun 2026 Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027 yang berlangsung di ruang Meranti, Kantor Bupati, Sangatta, Selasa (07/04/2026).

"Musrenbang RKPD 2027 ini merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan aspirasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan antara **pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten**".

H. Ardiansyah Sulaiman
Bupati Kutai Timur





Dalam kegiatan yang mengusung tema pembangunan **“Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Menuju Kutai Timur Sejahtera”** tersebut, Ia juga meminta seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja secara terukur dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, termasuk memastikan seluruh program tercantum dalam dokumen perencanaan resmi seperti RKPD dan Renja.

“Tidak boleh ada lagi kegiatan yang tidak tercantum dalam dokumen perencanaan. Semua harus terukur, jelas indikatornya, dan didukung data,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kutim ini juga menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“Musrenbang RKPD 2027 ini merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini memiliki peran strategis dalam menyelaraskan prioritas pembangunan dengan aspirasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap, melalui forum tersebut dapat dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, bersifat holistik, tematik, integratif, spasial, dan berbasis waktu, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur.

Disisi lain, Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Kutim telah mencatat sejumlah capaian pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Peningkatan kualitas jalan terus dilakukan secara bertahap, meskipun masih terdapat wilayah yang belum memiliki akses jalan mantap karena luasnya wilayah geografis Kutai Timur.

Di bidang sumber daya manusia, lanjutnya, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi dan program beasiswa Kutim Emas. Setiap tahun, sekitar 50 putra-putri daerah dikirim untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Ini adalah investasi jangka panjang kita untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas,” katanya.

Selain itu, Ardiansyah juga menyoroti dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dari kisaran 9 persen pada 2024 menjadi sekitar 1,05 persen. Penurunan tersebut, jelasnya, dipengaruhi oleh melemahnya sektor migas dan batu bara. Namun di sisi lain, sektor non-migas seperti pertanian, perkebunan, dan hortikultura justru menunjukkan tren positif.

“Kontribusi sektor non-migas meningkat dari sekitar 10 persen pada 2024 menjadi lebih dari 11 persen pada 2025. Ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang kita dorong mulai memberikan hasil,” ungkapnya.

Ia menegaskan, ke depan pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor-sektor non-migas sebagai penopang ekonomi yang lebih berkelanjutan, didukung oleh pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terakhir, Melalui Musrenbang RKPD 2027, Ardiansyah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dan memberikan masukan konstruktif, guna merumuskan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, Pemkab Kutai Timur optimistis pembangunan daerah dapat terus berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni, menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program kegiatan pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Kemudian, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional serta klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.

Kegiatan yang di gelar secara daring dan Luring menghadirkan narasumber dari Bappenas, Bappeda Kaltim, ini diikuti sebanyak 200 peserta termasuk Wakil Bupati Mahyunadi, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, Pimpinan Forkopimda, Kepala PD, Camat, Akademisi, tokoh masyarakat Perwakilan perusahaan serta undangan lainnya.



DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangsa
melayani
bangsa

BerAKHLAK

BPD Harus Sigap dan Bersinergi, Bupati Ardiansyah Dorong Pembangunan Tepat Sasaran

Sanggatta - 7 April 2026



Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa sejak dilantik sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para anggota BPD diharapkan bisa langsung beradaptasi dan memahami tugas serta fungsinya.

Dirinya juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari ketua BPD, kepala desa, hingga lembaga-lembaga desa lainnya, guna memastikan seluruh program dan kebijakan yang dijalankan dapat berjalan selaras, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, salah satu tugas utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, sekaligus berperan dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa secara bersama dengan kepala desa.

Orang nomor satu di Kutim itu juga menyoroti pentingnya pengawalan program bantuan khusus desa, khususnya yang menyasar tingkat Rukun Tetangga (RT). Dirinya meminta agar program tersebut dijalankan secara terarah dan terencana dengan baik.

"Di sinilah peran BPD sangat penting untuk turut mengawal, memastikan program berjalan dengan baik dan tepat sasaran," pungkasnya.

"Sebagai representasi masyarakat, saudara-saudara dituntut untuk benar-benar mengabdikan diri, menunjukkan kapasitas, serta berperan aktif dalam pembangunan desa bersama kepala desa, meskipun memiliki fungsi yang berbeda," ujar Bupati usai pengambilan sumpah/janji anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) di Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan.

H. Ardiansyah Sulaiman
Bupati Kutai Timur

Sementara itu, Camat Sangatta Selatan, Dewi, menjelaskan bahwa pelantikan ini dilakukan karena sebagian anggota sebelumnya mengundurkan diri dengan berbagai alasan diantaranya disebabkan yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mencalonkan diri sebagai kepala dusun.



f @ kominfo.kutim



Sinkronisasi Program Desa, Kecamatan Sangatta Selatan Siapkan Rakor Bersama Kades dan Lurah

Sangatta - 7 April 2026

Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan tengah mematangkan langkah strategis untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang akan di laksanakan di tahun 2026. Salah satu sasaran awal yang di sasar terkait pembenahan sisi administrasi yang akan di mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT).

Camat Sangatta Selatan, Dewi, mengungkapkan untuk memuluskan program tersebut, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa dan lurah di Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Kabupaten ini.

Menurut Dewi, dari hasil evaluasi yang sudah di lakukan, menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kebijakan di tingkat desa, khususnya terkait penggunaan anggaran RT, yang belum sepenuhnya selaras dengan program yang di canangkan oleh Pemerintah Kabupaten. Terutama yang berkaitan dengan 50 program prioritas Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Mahyunadi.

"Ke depan, kami akan menyelaraskan seluruh perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat desa agar sejalan dengan target prioritas pembangunan daerah, sekaligus mendukung dan mengoptimalkan program unggulan Kepala Daerah," ujar Dewi, Selasa (07/04/2026).

Ia menegaskan bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku, terdapat sejumlah bidang wajib yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan desa, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan dasar, serta pelayanan masyarakat termasuk posyandu.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya melibatkan secara aktif peran desa wisata menjadi ujung tombak pendataan masyarakat di tingkat paling bawah. Ia menjelaskan Desa wisata adalah unit kecil masyarakat yang menjadi penghubung langsung antara warga dan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan data dan pelaksanaan program di tingkat paling dasar.

Dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April atau Rabu ini, pihak kecamatan juga akan mendorong desa untuk memperkuat peran desa wisata, termasuk dalam mendukung program pemanfaatan pekarangan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

"Jika desa wisata aktif, maka berbagai program seperti peningkatan ekonomi keluarga, kesehatan, hingga pendidikan bisa lebih mudah diintervensi dari tingkat dasar," tambahnya.

Terkait penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dewi mengungkapkan bahwa selama ini alokasinya masih terpusat pada pembangunan infrastruktur. Padahal, ruang pemanfaatannya jauh lebih luas.





DISKOMINFO
STAPDA KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
BerAKHLAK

Dorong Transformasi Ekonomi, Bappeda Kutim Tekankan Penguatan SDM dan Infrastruktur

Sanggatta - 8 April 2026

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan pentingnya transformasi ekonomi sebagai langkah strategis memperkuat struktur ekonomi daerah.

Kepala Bappeda Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan bahwa tema pembangunan ekonomi yang diangkat saat ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi daerah.

Menurutnya, penurunan pertumbuhan ekonomi dari 9,8 persen menjadi 1,05 persen menjadi indikator penting yang harus dievaluasi secara menyeluruh.

"Tema ini kita ambil karena kita ingin menguatkan struktur ekonomi Kutai Timur. Penurunan pertumbuhan ini menjadi bahan evaluasi agar kita bisa lepas dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan," ujarnya.

Ia menegaskan, hasil evaluasi tersebut mendorong arah kebijakan pembangunan menuju transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak bertumpu pada satu sektor saja.

Dalam upaya tersebut, Januar menyebut penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur menjadi dua pilar utama yang tidak bisa dipisahkan.



“SDM dan infrastruktur itu saling berkaitan. Infrastruktur yang baik akan mendorong efisiensi distribusi barang, sehingga harga bisa lebih terjangkau dan daya beli masyarakat meningkat”.

Januar Bayu Irawan
Kepala Bappeda Kutim





DISKOMINFO
STAPER KUTIM

Kutai Timur Dalam Sepekan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berakhlak bermartabat, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan

TP PKK Kutim Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Program KISAK, KILAS, dan KIAT

Sangatta - 8 April 2026

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kutai Timur (TP PKK Kutim) menggelar pelatihan kader Pokja I yang mengusung program KISAK (Keluarga Indonesia Tertib Administrasi Kependudukan), KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual), dan KIAT (Keluarga Indonesia Anti Trafficking).

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, Sangatta, Rabu (08/04/2026) tersebut diikuti seluruh Pokja I TP PKK seluruh Kecamatan dan Desa se-Kutim. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas kader dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait administrasi kependudukan, perlindungan anak, serta pencegahan tindak perdagangan manusia.

Ketua TP PKK Kabupaten Kutai Timur, Ny. Siti Robiah Ardiansyah, menegaskan bahwa PKK memiliki empat kelompok kerja (Pokja) yang masing-masing berperan penting dalam pembangunan keluarga.

Ia menjelaskan, melalui program KISAK, masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya administrasi kependudukan. Setiap anggota keluarga wajib memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, hingga KTP sebagai identitas hukum yang sah.

Lebih lanjut, istri orang nomor satu di Kutim ini juga menyampaikan melalui program KILAS, kader PKK diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

"Edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual sangat penting agar anak-anak kita tidak menjadi korban. Peran orang tua dan lingkungan sangat menentukan," tegasnya.

Sementara itu, melalui program KIAT, masyarakat diberikan pemahaman terkait bahaya perdagangan manusia atau trafficking yang kerap terjadi akibat minimnya informasi.

Ia menambahkan, apabila seluruh program PKK dari Pokja I hingga Pokja IV dapat dijalankan secara optimal, maka akan tercipta masyarakat yang lebih tertata, baik dari segi moral, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi keluarga.



Penanggung Jawab :

Kepala Dinas Kominfo Staper
Ronny Bonar H. Siburian, SE., M.A.P.

Pimpinan Umum :

Kabid IKP & Kehumasan
Aji Nazaruddin, S.H., M.M.

Pengarah :

M. Lalu Joni Aswadi

Pempinan Redaksi :

Arie Firdaus
Wak Hedir
Wahyu Yuli artanto

Anggota Redaksi :

Wiryadi Tamrin
Maulana
Fiqri
Irhan



kominfo.kutim



Selengkapnya
Kutaitimurkab.go.id